



**WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 251 TAHUN 2024
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN NOMOR 43
TAHUN 2024 TENTANG PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN
INSPEKTORAT KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024**

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang:**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka diperlukan adanya suatu pengawasan serta pengendalian terhadap penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. bahwa untuk optimalisasi pelaksanaan tugas pengawasan di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin, maka perlu dilakukan perubahan atas Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 43 Tahun 2024 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kota Banjarmasin Tahun 2024 karena adanya perubahan pembagian wilayah kerja pemeriksaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 43 Tahun 2024 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kota Banjarmasin Tahun 2024.
- Mengingat:**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6332);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1605);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2022 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1218);
21. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
22. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
23. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 14);
24. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 44 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 45);
25. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 103 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 103);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 43 Tahun 2024 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kota Banjarmasin Tahun 2023 sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal 22 april 2024
WALI KOTA BANJARMASIN



IBNU SINA

**LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 251 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA
BANJARMASIN NOMOR 43 TENTANG PROGRAM
KERJA PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024**

**DAFTAR PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT)
TAHUN 2024**

WILAYAH	BULAN												
	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOPEMBER	DESEMBER	
IRBANWIL I	Reviu DAK (1 Tim)	Reviu Laporan Keuangan SKPD 2023 (1 Tim)	Reviu Laporan Kinerja (LKJ) Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2023 (Tim 1)		Probit Audit	Reviu Rancangan Renja SKPD Tahun 2025	ATT Perjalanan Dinas Bagian Kesra	Reviu RKA SKPD TA 2025	Reviu Rancangan RKA SKPD Perubahan TA 2024	Audit Kinerja Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin	Pemeriksaan Pencapaian SPM BPBD Kota Banjarmasin	Reviu Pengelolaan Dana BOS	
	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Bos Semester 2 (2 Tim)	Reviu Laporan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Pemko Banjarmasin Tahun 2023 (1 Tim)		ATT Honorarium Bagian Kesra Setda						Pemeriksaan Pencapaian SPM di Satpol PP Kota Banjarmasin	Audit Kinerja Dinas Lingkungan Hidup	Reviu DAK	
			Evaluasi SAKIP SKPD Tahun 2023 (1 Tim)										
		Pemeriksaan Ketaatan di Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin				Reviu Rancangan Akhir RKPD 2025	Reviu Rancangan Akhir Perubahan RKPD Tahun 2024	Reviu DAK	Reviu Rancangan Renja Perubahan SKPD 2024	Audit Kinerja Bidang P3K Dinas Koperasi UMTK	Reviu DAK		Penutupan Kas Akhir Tahun 2024
IRBANWIL II	Monitoring Pengadaan Barang dan Jasa TA 2023	Audit Ketaatan Program Kepegawaian Daerah (BKD, Diklat)	Evaluasi SAKIP SKPD Tahun 2023 (Tim I)	Audit Ketaatan Pemadam Kebakaran	Audit Kinerja Program Pengendalian Inflasi Daerah Disperdagin	Reviu Renja SKPD Tahun 2025 (Tim I)	Reviu Tata Kelola Perizinan dan Non Perizinan (MCP KPK)	Reviu RKA Perubahan 2024 (Tim I)	Reviu RKA 2025 (Tim I)	Audit Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Audit Kinerja PD PAL	Audit Ketaatan Dana Kelurahan di Kecamatan Banjarmasin Selatan	

WILAYAH	BULAN											
	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOPEMBER	DESEMBER
IRBANWIL II	Monitoring Pengadaan Barang dan Jasa TA 2023	Reviu Laporan Keuangan SKPD Pemko Banjarmasin TA 2023 (Tim I)	Evaluasi SAKIP SKPD Tahun 2023. (Tim II)	Audit Ketaatan Program Kepegawaian Daerah (BKD, Diklat)	Audit Kinerja Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Reviu Renja SKPD Tahun 2025 (Tim II)	Reviu Manajemen ASN (MCP KPK)	Reviu RKA Perubahan 2024 (Tim I)	Reviu RKA 2025 (Tim I)	Audit Kinerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Audit Kinerja PDAM	Audit Ketaatan Dana Kelurahan di Kecamatan Banjarmasin Barat
	Audit Ketaatan Dana Kelurahan TA 2023 Kecamatan Banjarmasin Utara											Pengawasan P3DN Disperdagin
	Audit Ketaatan Dana Kelurahan TA 2023 Kecamatan Banjarmasin Timur											Penutupan Kas Akhir Tahun 2024 (2 Tim)
IRBANWIL III	Stock Opname Persediaan Akhir Tahun Anggaran 2023 SKPD	Reviu Laporan Keuangan Pemko TA 2023	Evaluasi SAKIP SKPD Tahun 2023	Evaluasi LAKIP	Reviu KUA PPAS TA 2025	Reviu Ranhir Renja Perubahan 2024	Reviu DAK 2024 (Tim 1)	Reviu RKA Perubahan TA. 2024	Reviu RKA TA 2025	Audit Honorarium DPPKBPM	Audit Honorarium Bakesbangpol	Reviu PAPEJ TW IV
	Reviu DAK TA 2023	Audit Ketaatan Dinas Lingkungan Hidup	Reviu Laporan Keuangan Pemko TA. 2023	Reviu Standar Harga Satuan TA. 2025	Audit Kinerja Dinas Kesehatan	Reviu Ranhir Renja 2025	Reviu DAK 2024 (Tim 2)	Reviu DAK 2024	Audit Perjalanan Dinas Sekretariat DPRD	Audit Honorarium BPKPAD	Reviu DAK 2024 (Tim 1)	Reviu DAK 2024 (Tim 1)
			Probity Audit Dinas Kesehatan		Probity Audit	Probity Audit	Reviu KUPA PPASP TA 2024	Audit Bantuan Sosial Dinas Sosial	Reviu PAPEJ TW III	Reviu DAK 2024	Reviu DAK 2024 (Tim 2)	Reviu DAK 2024 (Tim 2)
						Reviu PAPEJ TW II						Penutupan Kas Akhir Tahun 2024

WILAYAH	BULAN											
	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOPEMBER	DESEMBER
IRBANSUS	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Survey Perilaku Anti Korupsi (SPAK) Pelayanan Dasar dan Pelayanan Publik	Monitoring dan Evaluasi LHKAN SPT Tahunan	Monitoring dan Evaluasi LHKPN	Monitoring dan Evaluasi LHKAN SPT Tahunan	Pendampingan Zona Integritas	Sosialisasi SPI dan Pendampingan Tindak Lanjut Hasil Survey SPI	Monitoring dan Evaluasi MCP KPK RI	Sosialisasi Saber Pungli dan Gratifikasi	Monitoring dan Evaluasi MCP KPK RI	Monitoring dan Evaluasi Benturan Kepentingan	Sosialisasi Belanja Hibah, Bantuan Sosial dan Belanja Tidak Terduga	Monitoring dan Evaluasi MCP KPK RI
		Monitoring dan Evaluasi PMPRB Ex - Ante		Monitoring dan Evaluasi PMPRB On-Going	Reviu HPS	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Saber Pungli	Monitoring dan Evaluasi PMPRB On-Going		Reviu Terhadap Pemenuhan TKDN	Monitoring dan Evaluasi PMPRB On-Going	Monitoring dan Evaluasi LHKPN	
SEKRETARIAT	-----TINDAK LANJUT PERJANJIAN KERJASAMA APIP DAN APH ----- ----- Pengawasan Penanganan Laporan Pengaduan (Whistleblowing System), Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Audit Investigatif----- Monitoring											

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA